

Petugas Sempat Alami Sesak Napas

Gudang Pestisida Dilalap Api, Damkar Padamkan Pakai Pasir



PADAMKAN. Kebakaran melanda gudang pestisida yang berlokasi di kawasan Taman Tekno, Kecamatan Setu, Senin (9/2).

SETU-Sebuah gudang pestisida di Taman Tekno, Kecamatan Setu, diamuk si jago merah, Senin (9/2) dini hari. Proses pemadaman sempat menemukan kendala.

Api yang bercampur bahan kimia dari gudang tersebut me-

nyebabkan kobaran sulit dipadamkan. Ketika api disiram air, justru sempat menimbulkan letupan-ledupan kecil dan asap tebal yang berbau menyengat membumbung tinggi memenuhi seluruh isi bangunan.

Setelah berjam-jam melakukan pemadaman, petugas akhirnya menggunakan pasir sebagai alternatif terakhir untuk memadamkan api. Metode tersebut mulai diterapkan sekitar pukul 14.00 WIB, saat api besar sudah

tidak terlihat namun masih tersisa titik-titik api kecil yang terus menyala.

Kepala Bidang Pemadam dan Penyelamatan Dinas Pemadam

► BACA GUDANG... HAL 7

Dikemas Di Botol Vitamin Ternak, 32 Ribu Obat Keras Diamankan Polisi

SERPONG-Aparat Polsek Serpong berhasil menggagalkan peredaran 32.000 butir obat keras golongan G di wilayah Serpong. Ia juga mengapresiasi seluruh insan pers yang telah mempercayakan Provinsi Banten sebagai tuan rumah puncak peringatan HPN 2026.

botol vitamin ternak.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial NW (25). Pelaku ditangkap di salah satu ruko di wilayah Lengkong Gudang

Timur, Kecamatan Serpong.

Kapolsek Serpong, Kompol Suhardono menjelaskan, pengungkapan kasus peredaran obat keras ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas men-

curigakan seseorang yang diduga membawa obat keras golongan G.

“Berawal dari informasi

► BACA DIKEMAS... HAL 7

Dinilai Komitmen Majukan Dunia Olahraga

Bupati Serang Raih Golden Award SIWO PWI



PENGHARGAAN. Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiah saat menerima penghargaan di HPN Banten 2026 yang digelar di KP3B, Kota Serang, Senin (9/2).

SERANG-Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiah memperoleh penghargaan Golden Award Anugerah Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, sebagai Bupati Peduli Olahraga. Apresiasi ini diberikan kepada Zakyiah di acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten yang digelar di Kota Serang pada Senin (9/2).

SIWO PWI Pusat menilai bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang di bawah kepemimpinan Bupati Ratu Rachmatuzakiah berkomitmen dalam memajukan dunia olahraga di Kabupaten Serang.

Tidak hanya di atas kertas, Bupati Serang secara tegas merealisasikan janji itu dengan bukti nyata. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan riil terhadap kegiatan yang terkait langsung dengan kemajuan dunia olahraga di Kabupaten Serang.

Dukungan Bupati Serang tersebut menjadi sangat strategis dalam memajukan dunia olahraga yang diperuntukkan untuk melakukan berbagai hal pembinaan, agar melahirkan para atlet potensial. Pembentukan yang intensif sudah dilakukan Pemkab Serang. Dedikasi ini yang menjadikan Kabupaten Serang salah satu daerah penghasil atlet berprestasi.

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiah mengatakan, penghargaan itu akan memotivasi Pemkab Serang untuk terus memajukan dunia olahraga di Kabupaten Serang. “Terima kasih kepada SIWO PWI Pusat yang sudah memberikan piagam Golden Award. Tentu akan menjadi motivasi bagi kami untuk memajukan olahraga di Kabupaten Serang,” katanya.

► BACA BUPATI... HAL 7

Andra Soni: HPN 2026 Di Banten Beri Dampak Positif Pariwisata & Ekonomi

SERANG-Gubernur Banten, Andra Soni menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten. Ia juga mengapresiasi seluruh insan pers yang telah mempercayakan Provinsi Banten sebagai tuan rumah puncak peringatan HPN 2026.

Hal itu disampaikan Andra Soni usai menghadiri puncak HPN 2026 yang digelar di halaman Masjid Raya Al-Bantani di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (9/2).

“Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Banten, saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan pers yang telah



HARI PERS NASIONAL. Gubernur Banten, Andra Soni memberikan keterangan kepada wartawan terkait peringatan HPN Banten 2026 pada Senin (9/2).

mempercayakan Provinsi Banten sebagai tuan rumah Puncak HPN 2026,” ujar Andra Soni.

Menjadi tuan rumah HPN merupakan sebuah kehormatan sekaligus kesempatan bagi

Provinsi Banten untuk melayani insan pers dari seluruh Indonesia. Selama satu pekan pelaksanaan rangkaian HPN 2026, kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat,

khususnya di sektor ekonomi dan pariwisata. Hal itu juga menjadi pembuktian bahwa Provinsi Banten layak menjadi tuan rumah

► BACA ANDRA... HAL 7

Resmikan Gedung Yayasan Ibnu Abbas BSD

Mendikdasmen Tekankan Pendidikan Bermutu Untuk Semua

SERPONG-Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengapresiasi yayasannya dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) atas kontribusi nyata dalam menghadirkan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Abdul Mu'ti saat meresmikan gedung Yayasan Ibnu Abbas BSD, Kecamatan Serpong, Senin (9/2), sebagai bagian dari penguatan ekosistem pendidikan yang inklusif dan bermutu.

“Kami berterimakasih atas dukungan dan partisipasi yayasannya serta pemerintah daerah. Tugas kami sebagai penyelenggara negara adalah melaksanakan amanah konstitusi, yakni memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua,” ujar Abdul Mu'ti dalam peresmian itu, Senin (9/2).

Ia menjelaskan, Undang-Un-

dang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) memuat dua pesan utama. Pertama, pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga negara atau education for all. Kedua, layanan pendidikan yang diberikan harus berkualitas, bukan pendidikan yang asal-asalan.

“Kalau istilah sekarang, bukan yang kaleng-kaleng. Kita ingin layanan pendidikan yang benar-benar berkualitas,” tegasnya.

Abdul Mu'ti menuturkan, pemerintah terus berupaya memperluas akses pendidikan tidak hanya melalui jalur formal, tetapi juga pendidikan nonformal dan informal. Hal tersebut dilakukan karena angka anak tidak sekolah dan putus sekolah, khususnya transisi dari SMP ke SMA, masih tergolong tinggi dan cenderung meningkat.

Ia memaparkan, terdapat empat kendala utama yang me-



PERESMIAN. Mendikdasmen, Abdul Mu'ti dan Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie saat meresmikan gedung Yayasan Ibnu Abbas BSD Serpong, Senin (9/2).

nyebabkan anak usia sekolah tidak dapat mengenyam pendidikan, yakni kendala finansial, geografis, kultural, serta keterbatasan waktu akibat profesi. Karena itu, pemerintah mendorong penguatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), program kesetaraan

Paket A, B, dan C, serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

“Kami juga akan menghidupkan kembali akreditasi lembaga pendidikan nonformal. Ini membutuhkan dukungan masyarakat agar layanan pendidikan semakin

► BACA MENDIKDASMEN... HAL 7

FDI Purbaya



Dahlan Iskan

KONKRET saja. Saya mencoba inventarisasi apa saja yang jadi omon-omon negatif di dunia usaha. Yakni omon-omon yang lalu berkembang menjadi rumor. Negatif: seolah iklim bisnis kurang bersahabat.

Lalu muncul pertanyaan: dengan iklim bisnis seperti itu bagaimana bisa mengundang investasi. Apalagi modal asing. Padahal tanpa investor sulit mencapai pertumbuhan delapan persen. Pun enam persen.

Pertama, isu perampasan 2,5 juta hektare lahan sawit swasta. Seolah tidak ada kepastian hukum. Bagaimana pengusaha yang sudah dapat izin lengkap, sudah investasi puluhan miliar rupiah, tiba-tiba lahan kebunnya disita negara.

Rumornya besar sekali: 2,5 juta hektare sawit yang disita. Alangkah masifnya. Betapa dramatisnya. Lalu muncul rumor: akan diapakan kebun sawit seluas itu. Mampukah pemerintah mengelolanya dengan baik. Bukankah mutu kebunnya BUMN sendiri kalah oleh swasta. Tidakkah itu nanti membuat produktivitas sawit kita merosot.

Pokoknya: negatif sekali. Sampai ke soal siapa yang akan melakukan pemeliharaan kebun itu. Bagaimana pemupukannya. Apakah pupuknya tidak dikorupsi sehingga jatah untuk pohon sawitnya berkurang.

Padahal, ternyata, jumlah riil kebun sawit yang disita tidak 2,5 juta hektare. Info yang saya dapat “hanya” sekitar 300.000 hektare. Selebihnya adalah tanah kosong yang telantar. Tiwas rumor negatifnya luar biasa.

Kedua, pabrik-pabrik penggilingan padi swasta dirazia polisi. Sampai ke desa-desa. Tuduhan pada mereka banyak sekali. Mulai memainkan harga gabah sampai melakukan oplos beras.

Dengan tindakan keras itu harga beras/gabah dipaksa rendah. Tujuannya: untuk mengendalikan inflasi. Konsumen beras tentu puas. Tidak perlu memikirkan kenaikan pendapatan petani.

Rumor negatifnya: mekanisme ekonomi pasar dilawan dengan razia oleh polisi. Pebisnis beras serentak tiarap. Iklim bisnis gabah begitu buruknya di mata mereka.

Dunia bisnis tentu mengeluhkan mengapa cara-cara bisnis bisa

► BACA FDI... HAL 7

Hari Jadi Ke-18, Gerindra Tangsel Gelar Tasyakuran & Cek Kesehatan Gratis

CIPUTAT-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar tasyakuran sekaligus santunan bagi ratusan anak yatim dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gerindra ke-

18, Minggu (8/2). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Partai Gerindra yang diperingati setiap 6 Februari. Perayaan tahun ini digelar secara sederhana dan khidmat, namun

tetap menekankan pentingnya soliditas internal partai. Sekretaris DPC Gerindra Tangsel, Yudi Budi Wibowo mengatakan, peringatan HUT Gerindra ke-18 dilaksanakan sesuai arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Sesuai arahan DPP, perayaan HUT Gerindra digelar secara khidmat dan sederhana, namun tanpa mengesampingkan kekompatan serta peran dan kehadiran kader di tengah masyarakat,” ujar Yudi, Minggu (8/2).

Selain menggelar tasyakuran dan santunan yatim, DPC Gerindra Tangsel juga melaksanakan cek kesehatan gratis selama tiga hari berturut-turut di tiga lokasi berbeda, yakni Pasar Ciputat, Serpong, dan Pasar Graha Raya.

Yudi menambahkan, rangkaian kegiatan sosial tersebut akan terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan sebagai bentuk komitmen Partai Gerindra untuk terus hadir di tengah masyarakat.

“Ke depan masih ada beberapa kegiatan di bidang kesehatan hingga lingkungan yang akan digelar sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT ini,” ungkapnya.

Yudi juga mengajak seluruh pengurus dan kader Partai Gerindra untuk terus menjaga kedekatan dengan masyarakat. Khusus bagi kader yang menjabat di eksekutif dan legislatif, ia menekankan pentingnya menjaga amanah serta mengawal program Presiden yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Sesuai dengan tema HUT ke-18, yakni Kompak, Bergerak, Berdampak, Partai Gerindra harus

memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mengawal program-program Presiden yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Sementara, Benyamin Davnie yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, mengajak seluruh kader Partai Gerindra untuk bersiap mengambil peran menghadapi kontestasi politik selanjutnya.

“Partai Gerindra adalah partai yang harus kita besarkan, khususnya di Kota Tangerang Selatan. Saya mengajak seluruh kader untuk terus mengimplementasikan tema Kompak, Bergerak, Berdampak,” ujarnya.

Sebagai kader Partai Gerindra, Benyamin juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen untuk mengawal program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kita sebagai kader Partai Gerindra mari berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengawal program-program yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.(dra)



BERBAGI. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar tasyakuran sekaligus santunan bagi ratusan anak yatim dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gerindra ke-18, Minggu (8/2).

Remaja Bawa Sedan Ngebut Di Bintaro Hingga Terpelanting

PONDOKAREN-Sebuah mobil sedan mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Boulevard Raya Bintaro, tepatnya di depan kawasan bursa mobil, Kecamatan Pondok Aren, Sabtu (7/2) dini hari. Sedan berwarna hitam itu dilaporkan melaju dengan kecepatan tinggi sebelum akhirnya terpelanting dan mengalami kerusakan cukup parah.

Berdasarkan pantauan di lokasi kejadian, bagian depan kendaraan tampak ringsek akibat benturan keras. Beberapa komponen mobil terlihat rusak, sementara kendaraan sempat melintang di badan jalan.

Kanit Lantas Polsek Pondok Aren, AKP Romadhoni membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut. Ia mengatakan, kecelakaan diduga dipicu oleh aksi ngebut pengemudi di jalan umum.

Menurut Romadhoni, mobil tersebut

dikemudikan oleh FA (18). Saat kejadian, kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi layaknya balapan di jalan raya.

“Menurut keterangan saksi-saksi, bahwa mobil tersebut disalip sama mobil lain. Karena korban ini sedang melaju kencang, lalu ada mobil lain yang juga ngebut, sehingga pengemudi kaget dan akhirnya terpelanting,” ujar Romadhoni saat dikonfirmasi, Minggu (8/2).

Akibat kehilangan kendali, mobil oleng dan keluar dari jalur, hingga akhirnya mengalami benturan yang menyebabkan kendaraan terpelanting.

Di dalam sedan tersebut terdapat dua orang, yakni pengemudi berinisial FA (18) dan pemilik kendaraan berinisial RV (18). Keduanya diketahui masih berusia remaja.

Romadhoni menyebutkan, polisi menduga kondisi pengemudi dan

penumpang tidak dalam keadaan prima saat berkendara, meski masih dilakukan pendalaman lebih lanjut. “Kondisi keduanya diduga kurang fit saat mengemudi, namun untuk penyebab pastinya masih kami dalam,” jelasnya.

Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan serta mengatur arus lalu lintas guna menghindari kemacetan. Beruntung, dalam kejadian tersebut tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Kedua penumpang hanya mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan.

Pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, terutama di jalan umum, demi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.(dra)



KECELAKAAN TUNGGAL. Mobil yang dikemudikan seorang remaja ringsek usai kecelakaan tunggal.

Momentum Hari Pers Nasional 2026

PT Wahana Makmur Sejati Dukung Mobilitas Wartawan Lewat Layanan Servis Motor Keliling

SERPONG-Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Main Dealer sepeda motor Honda Jakarta-Tangerang, PT Wahana Makmur Sejati (WMS), hadirkan program servis sepeda motor Honda melalui layanan Servis Motor Keliling (SEMOK) yang berlangsung di lingkungan redaksi Liputan6.com, KLY KapanLagi Youiverse Head Office, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/2).

Bagian dari upaya WMS dalam mendukung kelancaran mobilitas insan pers, khususnya jurnalis yang membutuhkan sepeda motor Honda selalu berada dalam kondisi prima, momentum Hari Pers Nasional dimanfaatkan sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat hubungan otomotif dan media, sekaligus membangun ekosistem publikasi yang sehat dan berimbang bagi bisnis Wahana Artha Group (WAG).

Program servis ini melayani 40 unit sepeda motor Honda milik jurnalis dan karyawan media di lingkungan Liputan6.com. Seluruh layanan servis dilakukan dengan standar yang sama seperti di bengkel resmi AHASS, baik dari sisi teknis pengerjaan, sumber daya manusia, hingga penggunaan suku cadang asli.

Mekanik yang bertugas dalam kegiatan ini merupakan meka-

nik tersertifikasi Honda, dengan kompetensi dan kualifikasi yang sama dengan mekanik di jaringan bengkel resmi AHASS. Selain itu, peralatan yang digunakan juga mengikuti standar peralatan bengkel resmi, sehingga kualitas layanan tetap terjaga.

Tidak hanya itu, seluruh penggantian komponen menggunakan Honda Genuine Parts (HGP), yang telah teruji kualitas untuk sepeda motor Honda. Dengan demikian, konsumen tetap mendapatkan pengalaman servis yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan standar pabrikan.

“Melalui momentum Hari Pers Nasional, kami ingin menghadirkan program servis sepeda motor Honda sebagai bentuk dukungan terhadap mobilitas insan pers. Seluruh proses dikerjakan oleh mekanik tersertifikasi dengan peralatan terstandarisasi bengkel resmi AHASS dan suku cadang asli, sehingga kualitasnya tetap terjaga,” ujar Division Head of Marketing Planning & Analyst PT Wahana Makmur Sejati, Andra Friandana.

Layanan servis yang diberikan mencakup pengecekan menyeluruh, termasuk penggantian oli dan busi sesuai dengan standar perawatan sepeda motor Honda. Kegiatan ini juga menjadi sarana

edukasi mengenai pentingnya perawatan kendaraan roda dua secara berkala untuk menjaga performa mesin, meningkatkan keselamatan berkendara, serta memperpanjang usia pakai sepeda motor.

Kegiatan servis visit ini juga menjadi bagian dari pengenalan Servis Motor Keliling (SEMOK), layanan jemput bola yang merupakan salah satu Line of Business PT Wahana Artha Ritelindo. SEMOK dirancang untuk melayani kebutuhan servis sepeda motor Honda dalam skala grup, institusi,

maupun korporat, dengan standar pengerjaan yang sama seperti di bengkel resmi AHASS.

Pelaksanaan servis visit di lingkungan redaksi Liputan6.com mendapatkan respons positif dari insan pers. Kehadiran layanan servis dengan standar resmi dinilai membantu menjaga kesiapan kendaraan di tengah mobilitas kerja yang tinggi.

“Insan pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi terkait bisnis Wahana Artha Group kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin

menjaga kolaborasi yang telah terjalin agar ekosistem publikasi bisnis dapat terus berjalan secara sehat, objektif, dan profesional,” tambah Andra.

Melalui kegiatan ini, WMS menegaskan komitmen untuk terus membangun kolaborasi dengan media secara berkelanjutan.

Dengan menjunjung tinggi transparansi, profesionalisme, dan standar layanan, WMS berharap sinergi antara industri otomotif dan insan pers dapat terus berkembang dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat luas.(rs)



SEMOK. Insan pers dapatkan Servis Motor Keliling (SEMOK) dari PT WMS, di Hari Pers Nasional.

PENGUMUMAN STUDI AMDAL
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKOLAH AL WILDAN ISLAMIC SCHOOL - 18 OLEH YAYASAN AL WILDAN ASMIYA ACADEMY
YAYASAN AL WILDAN ASMIYA ACADEMY selaku pemrakarsa bermaksud melakukan Studi AMDAL untuk Rencana Pembangunan Sekolah AL WILDAN ISLAMIC SCHOOL - 18 yang berlokasi di Jalan Raya Serpong, RT.014 RW.005, Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kegiatan yang direncanakan berupa Pembangunan Gedung Sekolah dan Bangunan Penunjangnya di atas lahan seluas 16.156,49 m² dengan luas bangunan keseluruhan 24.590,00 m². Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 4 Tahun 2021, rencana kegiatan tersebut termasuk dalam kategori wajib AMDAL. Rencana kegiatan tersebut diperkirakan dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Dampak positif berupa terbukanya kesempatan kerja, sedangkan dampak negatif berupa penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, gangguan lalu lintas, peningkatan air limbah serta perubahan persepsi masyarakat. Pemrakarsa akan mengantisipasi dampak tersebut melalui pendekatan teknologi, sosial dan institusi yang akan diuraikan lebih rinci dalam dokumen AMDAL. Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui pengumuman ini YAYASAN AL WILDAN ASMIYA ACADEMY selaku pemrakarsa mengharapkan saran, masukan dan tanggapan masyarakat sebagai bahan kajian dan telaah dalam studi AMDAL. Saran, masukan dan pendapat dapat disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pengumuman ini dimuat.
Saran dan tanggapan dapat ditujukan kepada:
YAYASAN AL WILDAN ASMIYA ACADEMY
Alamat : Jl. Raya Serpong, RT.014 RW.005, Kelurahan Cilenggang Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Kode Pos: 15311
Email : alwildanasmiyaacademy@gmail.com
Telp/ Fax. : 081288957505

Tangerang, 15 Februari 2026

Tangsel Pos

Koran Nomor 1 di Tangerang Selatan

PENDIRI:
H Margiono (Alm)

PEMBINA:

Karim Papatungan
Kiki Iswara Darmayana

CEO:
Rumiati

KOMISARIS:

Budi Rahman Hakim

DIREKTUR:
Agus Yuli

PEMIMPIN UMUM:
Ari Suhendra

PEMIMPIN PERUSAHAAN:
Irma Permata

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Ari Suhendra **Dewan Kebijakan Redaksi:** Budi Rahman Hakim, Agus Yuli, Ari Suhendra **Redaktur:** Yuliawati Jaripudin, Irma Permata, M Arif Hamdi, Nipal Sutiana **Reporter:** Idril Mahdi, Rachman Deniansyah **Sekretaris:** Melani **Keuangan :** Agnes Sagita **Pracetak:** Andri Yansah (Kordinator), Tommi Burhanudin, Siti Hardiyanti, Awaldyan Fajar Solichin **IT:** Adit Nugroho **Sidang Redaksi:** Agus Yuli, Ari Suhendra **General Affair:** Irawan **Manager Iklan:** Jamaludin **Unit Manager Iklan:** M Rudie Kurniawan, Andi Budiman, Franky, **Admin Iklan:** Elma Norwanti **Sirkulasi:** Ferdy Eka Salim, Yadi Maulana, Susyanto **Biro Banten:** Yuliawati **Tim Advokat:** Suharyono & Associ ates

Penerbit: PT Serpong Media Utama **Alamat Redaksi:** Griya Pena, Ville C/32 Nomor 12, Golden Road, ITC BSD, Jalan Raya Serpong, Kota Tangerang Selatan. **Telepon:** Redaksi: 021-53150542, 021-53151050 **Berlangganan dan Iklan:** 021-53150542 **Fax:** 021-5383852 **email:** tangselpos@gmail.com
Harga Eceran: Rp 4.000/eks PT Serpong Media Utama BCA Cabang BSD **Nomor Rekening:** 4970485398 **Perwakilan Jakarta:** GEDUNG GRAHA PENa Lt 8 JALAN KEBAYORAN LAMA NO 12, JAKARTA SELATAN. Telp/Fax.021-53699624 **Percetakan:** PT Wahana Semesta Intermedia, Jalan Jampang, NO 99A Bekasi, Telp 08111071633

TARIF IKLAN			
IKLAN KOLOM/ DISPLAY		ADVETORIAL	SOSIAL/KELUARGA
Hitam Putih/BW	Hal 2,15	Hitam Putih/BW	Hitam Putih/BW
Berwarna/FC	Hal 8,9,16	Berwarna/FC	Berwarna/FC
Berwarna/FC	Hal 1		

Ketika Tetangga Datang Membawa Sapu

Oleh: **Winnie Septiana Sari**
Mahasiswa Magister Manajemen & Warga Kota Tangerang Selatan

KETIKA terdengar kabar bahwa Jakarta siap membantu Banten menangani persoalan sampah, reaksi warga Kota Tangerang Selatan barangkali campur aduk: antara lega, berharap, dan sedikit geli. Lega karena isu ini akhirnya dibicarakan lintas wilayah; berharap karena mungkin ada terobosan baru; geli karena tumpukan di sekitar kami sudah lebih dulu memberi “pidato” panjang tentang kondisi nyata di lapangan.

Tangsel tumbuh cepat—perumahan baru bermunculan, pusat kuliner semakin ramai, apartemen naik di sudut-sudut strategis. Pertumbuhan itu tentu menggembirakan dari sisi ekonomi, tetapi ada satu produk sampingan yang selalu ikut melonjak: sampah. Masalahnya, sistem pengelolaan kerap terasa seperti alarm kebakaran—berbunyi keras ketika TPS meluber, lalu mereda begitu krisis sesaat tertangani.

Sebagai mahasiswa magister manajemen, saya terbiasa membaca persoalan publik dengan kacamata strategis. Dalam ilmu ini, persoalan sampah bukan sekadar urusan teknis pengangkutan, melainkan masalah sistemik yang menyetuh perencanaan jangka panjang, tata kelola lintas institusi, dan perubahan perilaku masyarakat. Sayangnya, yang sering tampak justru kebalikannya: kita rajin memproduksi wacana besar, tetapi tertatih-mengurus hal paling mendasar—kantong plastik di dapur warga.

Dalam kerangka strategic management, tahap awal adalah membaca lingkungan eksternal secara cermat. Kota yang baik bukan hanya menghitung pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memetakan dampak ekologisnya. Pertanyaannya, apakah data produksi sampah di Tangsel sudah diperlakukan seteliti data pajak dan investasi? Apakah kita tahu secara presisi di kelurahan mana lonjakan terbesar terjadi, jenis sampah apa yang mendominasi, dan kapan beban puncak muncul? Jika jawabannya masih “perkiraan”, maka wajar bila kebijakan sering terasa reaktif.

Formulasi strategi adalah tahap berikutnya, dan di sinilah satir mulai terasa. Dokumen rencana, peta jalan, forum koordinasi, hingga jargon keberlanjutan kerap terdengar meya-



SAMPAH. Gerbang SMA 6 Tangsel

kinkan. Namun di tingkat warga, problem yang dihadapi tetap sama: truk datang terlambat, TPS penuh sebelum siang, aroma tak sedap menjadi latar pagi. Kita punya banyak diagram panah di layar presentasi, tetapi panah-panah itu belum sepenuhnya berujung pada penurunan bau di lingkungan.

Dalam logika manajemen, strategi berarti memilih prioritas—bukan sekadar menambah daftar program. Untuk Tangsel, prioritas itu mestinya jelas: pengurangan sampah di sumber, pemilahan yang benar-benar berjalan, penguatan bank sampah, investasi teknologi pengolahan, serta kerja sama regional yang dirancang sebagai sistem, bukan solusi darurat. Memindahkan beban ke wilayah lain tanpa memperkuat fondasi sendiri hanya akan menciptakan ketergantungan baru.

Di sinilah tawaran bantuan lintas wilayah harus dibaca secara kritis sekaligus konstruktif. Jika Jakarta membantu Banten, dan kawasan metropolitan mulai berpikir kolektif, Tangsel seharusnya berada di barisan depan pembaruan—bukan sekadar

penonton yang berharap limpahan solusi. Kerja sama regional semestinya menjadi sarana benchmarking: belajar dari praktik yang berhasil, menghindari pengulangan kegagalan, dan membangun sistem terpadu.

Namun kolaborasi antardaerah juga rawan menjadi panggung simbolik. Rapat panjang, foto bersama, dan siaran pers sering lebih cepat hadir dibanding perubahan di lapangan. Dalam istilah manajemen, inilah jurang klasik antara formulasi dan implementasi. Strategi hanya bermakna jika diikuti pengendalian yang ketat: indikator kinerja yang terukur, evaluasi berkala, serta transparansi kepada publik. Berapa persen sampah rumah tangga yang sudah terpilah? Berapa jam rata-rata keterlambatan pengangkutan? Berapa ton yang benar-benar berkurang di TPA? Tanpa angka-angka ini, keberhasilan mudah diklaim, tetapi sulit diverifikasi oleh warga.

Sebagai kota penyangga Jakarta, Tangsel tak bisa lagi bersembunyi di balik status geografis. Kami adalah bagian aktif dari mesin metropolitan—

menghasilkan konsumsi, mobilitas, dan tentu saja sampah. Maka tanggung jawabnya pun harus setara: berpikir regional, bertindak lokal, dan berhenti menganggap tempat pembuangan akhir sebagai solusi pamungkas.

Ada ironi lain yang sering dirasakan warga. Kampanye pemilahan digencarkan—dan itu patut diapresiasi. Tetapi tak jarang, sampah yang sudah dipisahkan kembali bercampur di bak truk yang sama. Dalam bahasa manajemen, ini bukan sekadar ketidaksinkronan kecil, melainkan misalignment antara kebijakan hulu dan kesiapan hilir. Warga diminta berubah, sementara sistem belum sepenuhnya mengikuti.

Jika kita serius berbicara tentang manajemen strategis, maka perubahan perilaku masyarakat harus berjalan beriringan dengan kesiapan infrastruktur dan tata kelola. Insentif, edukasi, dan teknologi perlu dirancang dalam satu kesatuan. Tanpa itu, partisipasi publik akan mudah luntur—bukan karena warga tak peduli, melainkan karena mereka lelah melihat upaya pribadi

tak berdampak pada sistem.

Satirnya, persoalan ini kerap diperlakukan seperti agenda tambahan, bukan inti kualitas hidup kota. Padahal bagi warga, kebersihan lingkungan bukan isu teknis, melainkan pengalaman sehari-hari: udara yang dihirup, jalan yang dilewati, halaman rumah yang ingin tetap layak dipandang. Dalam konteks itu, publik sebenarnya bertindak sebagai auditor paling jujur. Tidak perlu laporan tebal; bau yang menyengat dan tumpukan yang menggunung sudah cukup menjadi indikator.

Momentum kolaborasi lintas wilayah semestinya digunakan untuk melakukan lompatan cara berpikir: dari reaktif menjadi preventif, dari sektoral menjadi regional, dari proyek jangka pendek menjadi transformasi berkelanjutan. Tangsel dapat menjadikannya peluang untuk menata ulang strategi—bukan sekadar memperbaiki permukaan.

Pada akhirnya, sampah tidak membaca dokumen perencanaan, tidak mengikuti garis administrasi, dan tidak menunggu

jadwal rapat koordinasi. Ia hanya tumbuh seiring pola konsumsi kita. Pertanyaannya, apakah strategi kita tumbuh secepat itu pula?

Sebagai penutup, perlu disadari bahwa kesempurnaan tidak mungkin dicapai seketika dalam pengelolaan persoalan kompleks seperti sampah perkotaan. Namun justru karena itulah publik menunggu arah kebijakan yang jelas, konsistensi dalam penerapan, serta keberanian Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengambil keputusan strategis jangka panjang. Pada titik ini, pengelolaan lingkungan hidup tidak lagi semata soal teknis, melainkan cerminan mandat dasar pemerintahan yang dibiayai oleh pajak warga: melayani kualitas hidup masyarakat yang menopangnya. Kolaborasi regional hanya akan bermakna jika diterjemahkan menjadi kebijakan yang konsisten di tingkat kota—sebab di sanalah kualitas tata kelola diuji, bukan oleh banyaknya forum, melainkan oleh lingkungan yang benar-benar membaik dalam kehidupan sehari-hari. (*)

Tangsel: KRL dan MRT Siap, Tapi Warga Masih Pilih Kendaraan Pribadi

Oleh: **Agha Fahmi Al Fatih**
Mahasiswa Fakultas Dirasat Islamiyah, UIN Syarif Hidayatullah

TANGERANG Selatan adalah kota yang menjanjikan kemajuan, namun setiap hari janji itu terbentur pada kemacetan yang masif. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan dan BPTJ telah bekerja keras merancang solusi, termasuk agenda penataan simpul transportasi penting, seperti Stasiun Tangerang pada 2025. Meski demikian, sebaik apa pun rencana pusat, keberhasilannya diuji oleh komitmen di tingkat lokal. Pertanyaannya: mengapa kemajuan fisik transportasi tidak membuat warga meninggalkan mobil atau motor di rumah?

Jurang Antara Angkutan Besar dan Kehidupan Sehari-hari

Kunci masalah terletak pada first mile dan last mile—jarak dari rumah ke stasiun, dan dari stasiun ke tujuan akhir. Studi IIETA menemukan bahwa sekitar 51 % komuter masih menggunakan kendaraan pribadi untuk first mile, sementara hanya 13 % berjalan kaki. Untuk last mile, ride-hailing mendominasi 46 %, berjalan kaki 29 %, dan mikrotransit 13 %. Data ini menunjukkan bahwa meskipun

un KRL atau MRT tersedia, akses dari dan ke stasiun tetap menjadi penghalang utama.

Banyak perumahan baru di Tangsel tidak memiliki akses memadai ke angkutan umum. Inilah yang memaksa warga menggunakan kendaraan pribadi, bahkan untuk jarak satu atau dua kilometer. Infrastruktur pendukung pun minim: trotoar terputus-putus, kerap digunakan parkir liar, atau berubah fungsi menjadi lapak usaha. Di stasiun yang direvitalisasi, pejalan kaki masih berebut jalan dengan motor yang parkir sembarangan. Kenyamanan dan keamanan untuk berjalan kaki atau bersepeda hampir nihil.

Seorang warga Tangsel pernah menulis di forum daring:

“Buat jalur dan sistem feeder bus yang sampai ke area perumahan... seenggaknya 5–10 menit jalan kaki dari kompleks perumahan. Kalau tidak, orang tetap pilih motor atau mobil.”

Jika biaya waktu dan energi untuk mencapai stasiun lebih besar dibanding mengendarai kendaraan pribadi, semua investasi pemerintah pusat akan sia-sia. Kebijakan terasa jauh dari kehidupan sehari-hari warga di gang-gang Tangsel.

Kunci Ada di Pemerintah Kota

Keberhasilan integrasi transportasi bergantung pada Pemerintah Kota Tangsel. Kebijakan pusat hanya efektif jika Pemkot berani bertindak tegas dan konsisten, bukan sekadar menunggu instruksi.

Pemkot harus memastikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) selaras dengan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Ini berarti membatasi pembangunan properti yang menghambat akses publik, memprioritaskan trotoar pro-pejalan kaki, dan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan zona komuter secara masif.

Selain itu, konsistensi harus diterapkan pada penertiban parkir liar dan optimalisasi angkutan pengumpan (feeder). RUJT Tangsel 2025 menetapkan 33 trayek angkot, tapi trayek ini hanya efektif jika menjangkau permukiman dan memiliki jadwal jelas. Seorang pengguna angkot menambahkan:

“Angkot ada, tapi kadang ngak jelas jadwalnya. Kalau kita butuh pas pagi atau sore, sering kehabisan. Jadi orang tetap pakai kendaraan pribadi.”

Menuju Kota yang Terintegrasi



Keberhasilan integrasi harus diukur dari kemudahan yang dirasakan dari pintu rumah hingga tujuan akhir. Tangsel perlu menjadi kota yang menyatukan kebijakan pusat dengan realitas lokal. Tidak hanya

kaya infrastruktur mewah, tetapi miskin dalam kualitas mobilitas warganya sehari-hari.

Mewujudkan mimpi integrasi transportasi di Tangsel bukan soal angkutan besar semata. Keberhasilan sejati tercapai ketika

first mile dan last mile tertangani dengan baik, angkot dan feeder berjalan sesuai jadwal, trotoar nyaman, dan warga benar-benar merasakan kemudahan berpindah dari rumah ke stasiun dan sebaliknya. (*)



Dapatkan Informasi Terkini Seputar Banten Hanya di <https://tangselpos.id>

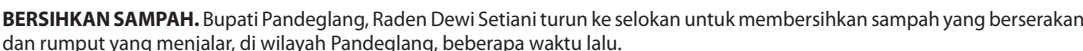


Bupati Pandeglang Ajak Perangi Sampah

“Ini ada kegiatan korne-korne,

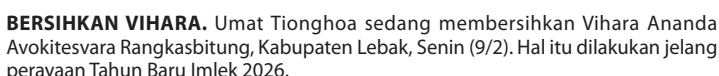
Senada, Wakil Bupati (Wabup)
Pandeglang, Iing Andri Supriadi

ling menambahkan, persoalan sampah dapat berdampak terhadap lingkungan, kesehatan, hingga sektor pariwisata. “Sampah sangat merugikan, baik merusak keindahan lingkungan, mengganggu kesehatan, termasuk kawasan wisata pantai,” tandasnya.(pal)



Jelang Tahun Baru Imlek, Umat Tionghoa Lebak Percantik Vihara

Pengurus Vihara Ananda Avokitesvara Rangkasbitung, Randi Wandu (52), mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tradisi bersih-



Selain ritual cuci rupang, rangkaian kegiatan jelang Imlek juga meliputi penggantian lampion dan lilin vihara. Pada tanggal 10 penanggalan Tionghoa, umat akan melaksanakan sembahyang kepada leluhur

Puncak perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili sendiri jatuh pada 17 Februari 2026 dan direncanakan akan dime-
riahkan dengan pertunjukan

Randi berharap perayaan Imlek 2026 yang menandai shio Kuda dengan elemen api dapat membawa energi positif. “Shio ini melambangkan semangat

tinggi, keberanian, kemandirian, serta kerja keras, yang diharapkan membawa kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat,” tandasnya menjelaskan.(pal)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG

Sukseskan

Hari Pers
Nasional

Banten
2026

Banten
2026

ANDRA SONI
GUBERNUR BANTEN

A. DIMYATI NATAKUSUMAH
WAKIL GUBERNUR BANTEN

HARI PERS
NASIONAL

PROVINSI BANTEN
6 - 9 FEBRUARI 2026

Prof. Komaruddin Hidayat
Ketua Dewan Pers

Ahmad Munir
Penanggung Jawab HPN/Ketum PWI Pusat

Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat

H. TB. A. KHATIBUL UMAM, M. Pd
KETUA DPRD

FIKRI PEBRIANSYAH, S. Sos
WAKIL KETUA DPRD

M. DADI RAJADI, SE
WAKIL KETUA DPRD

MM. FUHAIRA AMIN, SE
WAKIL KETUA DPRD

Drs. SUA'EDI KURDIATNA, M. Si
SEKRETARIS DPRD



Petugas Sempat Alami Sesak Napas

Gudang Pestisida Dilalap Api, Damkar Padamkan Pakai Pasir

■ SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Omay Komarudin mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 04.25 WIB. Petugas lang-

sung bergerak cepat dan tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 04.30 WIB.

“Kami menerima laporan sekitar pukul 04.25 WIB dan tiba di lokasi kurang lebih pukul 04.30 WIB. Saat itu petugas langsung melakukan pemadaman,” ujar

Omay.

Saat petugas tiba di lokasi, kondisi api sudah membesar dan melalap sebagian area gudang. Material yang terbakar diduga merupakan bahan kimia sehingga api sulit dikendalikan dan kerap kembali menyala meski te-

lah disemprot air. “Ketika sampai, api sudah dalam kondisi besar,” katanya.

Omay menjelaskan, hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam pendalaman. Dugaan awal mengarah pada korsleting listrik atau faktor lain, namun pihaknya

masih meminta keterangan dari pemilik gudang.

“Penyebab kebakaran masih kami dalam. Apakah korsleting listrik atau dugaan lainnya, masih kami tanyakan kepada pemilik gudang,” jelasnya.

Dalam upaya penanganan kebakaran tersebut, Damkar Tangsel mengerahkan 10 unit mobil pemadam, dibantu 2 unit pemadam dari BSD, serta 2 unit mobil tangki air untuk suplai air di lokasi.

Selama proses pemadaman, sebagian petugas sempat mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap yang tercampur bahan kimia. Namun kondisi mereka dapat segera ditangani.

“Alhamdulillah anggota semua sehat. Hanya ada satu sampai dua petugas yang sempat sesak napas dan langsung kami beri oksigen,” katanya.

Api baru benar-benar berhasil dipadamkan sepenuhnya setelah sekitar 12 jam proses penanganan, dan memasuki tahap pendinginan sekitar pukul 16.00 WIB.

Bahan Kimia Diduga Cemari Sungai Jaletreng

Akibat peristiwa kebakaran itu, aliran Sungai Jaletreng diduga tercemar. Kondisi air sungai berubah menjadi berwarna putih di pagi hari. Kejadian itu pun son-tak membuat warga heboh.

Selain mengubah warna, juga tercium aroma menyengat dari sungai. Saat Tangsel Pos menyusuri aliran sungai Jaletreng, sekitar pukul 13:24 WIB warna aliran sungai sudah normal kembali. Warna putih sudah tak terlihat.

Namun, bau menyengat masih tercium di sekitar lokasi. Bau tersebut menyerupai aroma minyak tanah yang menyengat. “Ini masih bau, kayak bau minyak tanah atau apa lah gitu,” kata Tri, warga sekitar saat dijumpai di lokasi.

Sementara, saat ditelusuri lebih lanjut, bau tersebut juga

masih tercium hingga sejauh beberapa kilometer. Selain bau menyengat, ikan-ikan di kali tersebut juga mati. Seperti ikan nila dan sapu-sapu.

Saat mengikuti aliran sungai hingga ke Jalan Salem 3, seorang warga, Romo menuturkan, bahwa kejadian ini terjadi sejak subuh. “Jam 5 (pagi) lah. Bau yang menyengat ini sampai ke (permukiman warga) atas itu. Nyampe itu ke rumah warga yang di atas. 100 meter lah nyampe,” tuturnya.

Ia menceritakan, bahwa awalnya warga terkejut, aliran sungai berubah menjadi putih. Lalu mengeluarkan aroma menyengat. “Kayak cat lah seperti itu. Terus bau, kaya sekarang saja menyengat begini,” kata Romo.

Sementara, Tim Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel, Hadiman menyatakan, dugaan pencemaran ini berasal dari peristiwa kebakaran yang sebelumnya terjadi melanda salah satu bangunan gudang kimia.

Kendati demikian, hasil resminya belum dapat disampaikan. Karena harus melewati uji laboratorium terlebih dahulu.

“Iya kami sudah ke lapangan dan memang dugaan sementara dari pabrik yang kebakaran di Taman Tekno. Terkait kejelasannya nanti menunggu hasil laboratorium di 12 hari kerja,” paparnya.

Penata Layanan Operasional sekaligus Komandan Pleton (Danton) Satgas Penanggulangan Bencana SBPD Kota Tangsel, Dian Wiryawan mengimbau kepada masyarakat agar tidak mengambil ikan-ikan yang mati di sungai tersebut.

“Sebab khawatir terkontaminasi cairan kimia dan menyebabkan keracunan. Selain itu kami mengimbau juga kepada masyarakat agar tidak menggunakan air sungai untuk berbagai macam keperluan, seperti MCK atau lainnya,” pungkasnya.(rnn)

Dinilai Komitmen Majukan Dunia Olahraga

Bupati Serang Raih Golden Award SIWO PWI

■ SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Ia juga menerangkan, penghargaan diperuntukkan buat masyarakat olahraga di Kabupaten Serang. “Mari kita terus menorehkan prestasi di bidang olahraga sehingga dapat mengharumkan nama Kabupaten Serang,” ujarnya.

Pemkab Serang sangat mendukung kegiatan olahraga. Lantaran itu, Pemkab Serang menggelontorkan dana miliaran rupiah di bidang olahraga melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pari-

wisata (Disporapar). Selanjutnya, Disporapar mendistribusikan amanah uang tersebut buat kepentingan olahraga di Kabupaten Serang. “Kita berharap ke depan, dunia olahraga di Serang semakin berkembang,” tuturnya.

Sementara, Ketua SIWO PWI Pusat, Suryansah menyampaikan, para penerima anugerah sudah melalui proses seleksi dewan juri. “Setelah mempertimbangan penilaian dari Tim Keabsahan dan keputusan Dewan Juri, maka anugerah ini layak untuk diberikan kepada Bupati

Serang,” katanya.

Suryansyah berharap, capaian yang didapat, membuat Bupati Serang semakin termotivasi guna memajukan dunia olahraga sehingga dapat mengharumkan nama daerah dan bangsa.

Sekadar diketahui Puncak Peringatan HPN yang digelar di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang dihadiri mewakili Presiden Prabowo Subianto, yakni Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Turut hadir juga Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan sejumlah menteri lainnya.

Selain itu juga dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Anggota DPR RI Ahmad Fauzi, Gubernur Banten Andra Soni, unsur Forkopimda Provinsi Banten dan ratusan pengurus organisasi pers se- Indonesia.(cmb)

Andra Soni: HPN 2026 Di Banten Beri Dampak Positif Pariwisata & Ekonomi

■ SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

bagi penyelenggaraan kegiatan berskala nasional lainnya.

“Selama satu minggu ini, Provinsi Banten mendapat kehormatan melayani insan pers dari seluruh Indonesia. Tentu hal ini berdampak positif bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun pengembangan pariwisata,” paparnya.

Penyelenggaraan puncak HPN di Provinsi Banten ini berkat keterlibatan semua pihak, mulai

dari pemerintah kabupaten dan kota, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Ia menyampaikan terima kasih sekaligus permohonan maaf apabila lokasi masih terdapat kekurangan selama penyelenggaraan HPN 2026 di Provinsi Banten.

“Saya selaku Gubernur Banten mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila selama pelaksanaan HPN 2026 dirasa kurang maksimal,” katanya.

Andra Soni menilai, kehadiran insan pers dari berbagai daerah

turut membangkitkan semangat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut terlihat dari keterlibatan UMKM di lokasi puncak kegiatan maupun berbagai agenda pendukung di kabupaten dan kota se-Banten.

“Banyak UMKM yang terlibat langsung, baik di lokasi utama maupun di berbagai daerah. Ini tentu berdampak positif terhadap perputaran ekonomi dan pariwisata,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Andra Soni menegaskan, peran strategis

pers dalam perjalanan bangsa Indonesia. Menurutnya, pers selalu membersamai pembangunan sejak masa prakemerdekaan hingga saat ini. Kedudukan pers sangat penting sebagai pilar demokrasi dan mitra pemerintah dalam pembangunan.

“Bagi kami, pers adalah mitra strategis pemerintah daerah. Pers menjadi kawan berdiskusi sekaligus tempat memvalidasi berbagai dinamika informasi yang terjadi di masyarakat,” pungkasnya.(yul)

Dikemas Di Botol Vitamin Ternak, 32 Ribu Obat Keras Diamankan Polisi

■ SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

masyarakat, kemudian anggota melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tersangka,” katanya.

Dalam penangkapan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa obat keras golongan G jenis Trihexyphenidyl yang disimpan di dalam kardus berwarna cokelat. “Di dalam kardus tersebut terdapat 32 botol vitamin ternak, yang masing-masing botol berisi 1.000 butir obat-obatan

keras,” ungkapnya.

Dengan demikian, total barang bukti yang diamankan mencapai 32.000 butir obat keras. Rencananya, obat-obatan tersebut akan didaftarkan ke wilayah Jakarta dan Bandung.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 5 miliar.(dra)

FDI Purbaya

■ SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

dianggap perbuatan kriminal. Narasi “beras oplosan” dibuat begitu negatifnya. Padahal itu praktik yang normal di dunia bisnis untuk membuat mutu dan harga tertentu.

Ketiga, penertiban tambang batubara. Sebenarnya program ini sangat mulia. Toh hanya tambang ilegal yang ditertibkan. Tapi rumor yang berkembang menjadi seolah bisnis tambang lagi dimusuhi.

Keempat, molornya persetujuan atas rencana tahunan tambang apa saja. Sampai awal Januari rencana kerja tambang swasta tahun 2026 belum ada yang disetujui. Padahal seharusnya November sudah harus jelas.

Kegiatan tambang pun sempat terhenti. Para pengusaha di bidang pertambangan tidak berani bekerja kalau rencana tahunan itu belum disetujui.

Soal ini berkembang menjadi rumor yang sangat negatif. Terutama di kalangan pelaku bisnis nikel dan batubara. Kasak-kusuk berkembang: mengapa terjadi keterlambatan begitu parah. Kurang sogokan? Takut kriminalisasi? Bagaimana bisnis bisa jalan kalau birokrasinya begitu menghambat?

Ada juga rumor begini: itu karena yang mengeluarkan izin berada dalam ketakutan yang akut. Takut salah. Takut ditangkap APH. Itulah yang sudah dialami oleh Dirjen Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Ridwan Djamaluddin. Kini ia sedang diadili atau sudah masuk penjara.

Akhirnya beres. Sebagian. Sudah ada rencana penambangan yang disetujui meski sangat telat waktunya. Sebagian lagi tetap belum ada persetujuan.

Yang sudah disetujui itu pun angkanya tidak sama dengan yang diminta. Biasanya angka persetujuan yang baru sama dengan tahu sebelumnya. Bahkan meningkat.

Tapi kali ini banyak yang hanya disetujui sebagiannya. Berarti produksi harus diturunkan.

Sebenarnya “tidak disetujui” atau “disetujui sebagian” itu ada maksud baiknya. Sangat baik. Tapi karena prosesnya lambat akhirnya jadi rumor negatif.

Maksud baiknya adalah: jangan sampai batubara dikuras dengan kekuatan penuh seperti selama ini. Apalagi itu terbukti hanya menguntungkan segelintir oligarki.

Maka kebijakan pemerintah yang baru ini justru sangat mulia: agar sumber daya alam kita tidak dikuras semau-mau pengusaha.

Dua tahun terakhir Disway mencatat drama pengurusan sumber alam ini. Seorang pengusaha tambang batubara tiba-tiba bisa untung Rp 2 triliun sebulan. Lalu mendadak jadi orang terkaya di Indonesia. Ingat: Rp 2 triliun laba sebulan. Sebulan.

Maka penataan ulang ini harus didukung. Pemerintah bisa menyeimbangkan pasar. Jangan sampai pasokan jauh lebih besar dari permintaan. Harga bisa nyungsep. Penerimaan pajak negara bisa babak belur.

Tentu, yang penting, kebutuhan batubara dalam negeri harus tercukupi. Jangan sampai produksi direm tapi kebutuhan

dalam negeri dikalahkan.

Sayang, kebijakan yang begitu baik hancur oleh lambatnya pelayanan dan buruknya komunikasi. Tujuan mulianya tidak tersampaikan ke publik. Justru iklim bisnis yang menjadi sangat negatif.

Masih banyak kasus negatif lainnya: Anda bisa menambahkan sendiri. Banyak yang seperti itu. Intinya: hukum bisnis seperti kalah dari hukum kekuasaan.

Salah satunya dicerminkan dalam kian banyaknya jabatan direktur, komisaris dan pimpinan lembaga yang diserahkan ke tokoh militer. Tentu itu tidak melanggar hukum, tapi mengganggu persepsi.

Faktanya, mungkin, sebenarnya mereka pun mampu dan bisa. Tidak kalah dari yang non militer. Tapi di zaman medsos ini fakta kalah dengan persepsi.

Persepsi pada umumnya: negatif.

Lalu meledaklah krisis saham di akhir Januari 2026. Kekuatan asing ternyata begitu perkasanya: mampu mengguncang pasar modal dalam sekejap.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditanya dalam satu forum bahasa Inggris: soal FDI –foreign direct investment. Apakah dalam persepsi seperti itu bisa diharap modal asing akan mau masuk ke Indonesia.

Saya sangat setuju dengan jawaban Purbaya: “kalau ekonomi Indonesia bisa tumbuh enam-tujuh persen, modal asing akan datang sendiri ke Indonesia”. Modal asing akan selalu mencari lokasi di mana pun yang bisa mendapat keuntungan.

“Saya tidak mau ngemis-

ngemis ke mereka di saat ekonomi kita not good,” katanya.

Itu benar sekali. Buktinya, modal asing tetap membanjir ke Tiongkok. Termasuk modal dari negara kampiun demokrasi. Padahal, Tiongkok, yang mereka sebut sebagai otoriter, harusnya mereka benci. Tetapi karena ekonomi Tiongkok baik mereka pun mengabaikan kebencian itu.

Maka Purbaya bertekad menumbuhkan ekonomi dengan kekuatan sendiri dulu. Sampai tumbuh enam persen. Ia optimis bisa. Asal swasta digerakkan.

Di zaman Jokowi, katanya, swasta tidak bisa bergerak. Akibatnya ekonomi berhenti tumbuh di lima persen. Padahal proyek dibangun di mana-mana. Besar-besaran.

Di zaman SBY, katanya, pemerintah tidak berbuat apa-apa. Ekonomi bisa tumbuh enam persen. Itu karena swasta bergerak.

Tesis Purbaya itu tentu banyak tantangan: bagaimana swasta bisa bergerak kalau persepsi dunia bisnis begitu negatif.

Sesuatu yang baik ternyata bisa jadi negatif oleh pelaksanaan yang kurang tepat. Termasuk soal waktu.

Purbaya terlambat datang di kabinet Prabowo. Seharusnya ekonomi tumbuh enam-tujuh persen dulu. Baru penertiban sawit, batubara, gabah dan lainnya dilakukan: alangkah tepat dan baik hasilnya.

Semua sudah terjadi. Maka kita tunggu tumbuh enam persen itu. Lalu kita tunggu FDI datang.

Lebih dari itu: kita tunggu apa yang akan terjadi.(Dahlan Iskandar)



Jurnalis Banten Serukan Stop Kriminalisasi

SERANG-Massa yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Banten menggelar demonstrasi di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (9/2). Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas dugaan kriminalisasi terhadap insan pers.

Dalam orasinya, massa menilai perayaan Hari Pers Nasional (HPN) yang berlangsung meriah tidak sejalan dengan kondisi kebebasan pers di lapangan. Mereka menyoroti masih adanya jurnalis yang menghadapi intimidasi hingga proses hukum terkait karya jurnalistik.

Koordinator aksi, Budi Wahyu Iskandar, menegaskan bahwa kebebasan pers di Banten memerlukan perhatian serius. Menurutnya, sengketa pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bukan melalui jalur pidana.

"Kami mendesak seluruh proses hukum terhadap jurnalis terkait produk jurnalistik dihentikan dan sengketa pers diselesaikan sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Pers," ujarnya.

Ia juga mengatakan, perayaan Kebebasan pers pada HPN 2026 di Banten jadi momentum perayaan palsu. Lantaran kepala daerah dan pejabat publik di Banten masih belum mafhum UU No 40 tahun 1999 tentang pers, dan masih ban-

yak pejabat publik yang menghalang-halangi kerja jurnalistik di lapangan.

"Penghalangan kerja pers yang terjadi di lapangan itu berupa intimidasi, kekerasan hingga kriminalisasi terhadap karya jurnalistik. Atas kondisi ini, Banten belum pantas menjadi tuan rumah perayaan Hari Pers Nasional (HPN)," tandasnya lagi.

Pantauan di lokasi, massa membenarkan spanduk bertuliskan "Stop Kriminalisasi Pers" serta membawa selebaran dengan tulisan "Di Tanah Jawa, Pena Masih Dibungkam, Kebenaran Diancam Jeruji Besi".

Selain itu, massa juga menuntut penghentian segala bentuk intimidasi, baik fisik maupun psikis, terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Wartawan Banten menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni menghentikan kriminalisasi terhadap jurnalis, mendorong penerapan penuh UU Pers dalam penyelesaian sengketa pemberitaan, serta menolak segala bentuk tekanan terhadap kebebasan pers.

Aksi ini menjadi sorotan karena Provinsi Banten merupakan tuan rumah HPN 2026. Massa menilai status tersebut harus diiringi komitmen nyata dalam menjamin perlindungan kerja jurnalistik dan keselamatan wartawan.(yul)



DEMONSTRASI. Massa yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Banten menggelar demonstrasi di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (9/2).

Festival Anyer-Panarukan Digelar Tahun Ini

SERANG-Bupati Situbondo, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengunjungi Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah di Pendopo Bupati Jalan Veteran Nomor 1 Kota Baru, Kota Serang pada Senin (9/2) sore. Kedatangan Bupati beserta jajaran untuk membahas kolaborasi Program Festival Anyer-Panarukan yang akan digelar tahun ini.

Yusuf Rio mengatakan, pembahasan Festival Anyer-Panarukan berawal dari obrolan panjang bersama Gubernur Banten Andra Soni, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan beberapa menteri termasuk Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto. "Obrolan panjang itu semuanya menyambut baik," ujarnya kepada wartawan.

Dijelaskan Bupati, Anyer-Panarukan merupakan artefak sejarah yang harus dihidupkan. Karena bagaimanapun, berbicara Anyer-Panarukan ada sisi negatifnya dan ada sisi positifnya yang melampaui zaman, seperti yang dirasakan hari ini pertumbuhan ekonomi, kondisi ekonomi di Pulau Jawa begitu dahsyatnya. "Itu semua karena Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan itu," tandasnya.

Oleh karena itu, Yusuf Rio dan Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah akan menjadikan Program Festival Anyer-Panarukan. Diharapkan, kedepan muncul kunjungan, muncul investasi yang pada akhirnya itu bisa multiplayer efeknya berdampak kepada tumbuh kembangnya masyarakat secara ekonomi.

"Terutama untuk mengentaskan kemiskinan, UMKM berjalan, dan segala hal lainnya. Nah ini



PEMBAHASAN FESTIVAL. Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyambut kedatangan Bupati Subondo Yusuf Rio dalam agenda pembahasan rencana Festival Anyer-Panarukan, di Pendopo Bupati Serang, Senin (9/2).

baru pertemuan pertama dengan Bupati Serang, nanti ada follow up action dari kita," katanya.

Festival Anyer-Panarukan diisi dengan kegiatan semacam olah-raga fun run, serta kegiatan religi yakni pengajian. Akan tetapi untuk khusus dua ide belum disetujui antara Bupati Ratu Rachmatuzakiyah dan Bupati Yusuf misalnya pertukaran santri.

"Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Serang sama-sama basis pesantren. Kemudian pertukaran atau barter komoditas, kaya kami surplus akan gula, tentu apakah di sini ada gula, nah bisa nanti kami tukar. Misalnya di sini ada apa ditukar saja. Kita berbicara dalam kondisi yang harus kreatif, sesuai asta cita nomor dua tentang membangun ekonomi yang kreatif," terangnya.

Yusuf Rio memastikan, Festival

Anyer-Panarukan akan digelar Agustus mendatang bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Situbondo dan Oktober Hari Jadi Kabupaten Serang. "Festival Anyer-Panarukan ini bukan event, ini program bertahun-tahun nanti akan ada Anyer-Panarukan setiap tahunnya," papar Yusuf.

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo beserta seluruh jajaran yang melakukan kunjungan kerja dalam rangka merencanakan giat Festival Anyer-Panarukan. Ia menyebutkan, bahwa sudah beberapa kali melakukan pertemuan namun saat ini secara resminya.

"Saat ini untuk menyampaikan presentasi apa saja giat yang akan dilaksanakan pada Festival

Anyer-Panarukan, dan tentu saya secara pribadi dan pemerintah daerah menyambut baik kegiatan ini, apalagi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah kami," ujarnya.

Adapun untuk persiapan awal, Ratu Zakiyah sapaan Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi secara intens antara Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Serang. "Serta melakukan konsolidasi untuk dua kabupaten ini, karena kan nanti kegiatan itu akan ada di dua kabupaten," tuturnya.

Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana, Asda I Syamsuddin, Asda II Febriyanto dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang.(cmb)



DISKUSI. Suasana Focus Group Discussion yang digelar Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten terkait pemungutan zakat profesi, Senin (9/2).

Baznas Kaji Pemungutan Zakat Profesi

SERANG-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten saat ini tengah mengkaji pemungutan zakat profesi. Hal itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang bertema "Zakat Profesi dan Tantangan Implementasi: Literasi Zakat, Kepatuhan Muzaki, dan Peran Amil".

Ketua BAZNAS Provinsi Banten, Wawan Wahyuddin menegaskan bahwa perkembangan kehidupan yang begitu cepat menuntut pengelolaan zakat yang adaptif dan berdaya guna. Menurutnya, zakat harus mampu menjadi instrumen keberkahan sekaligus solusi sosial yang terus mengibarkan semangat perbaikan dan kebaikan.

"Perkembangan kehidupan yang cepat menuntut pengelolaan zakat yang berdaya guna sebagai solusi sosial dan instrumen keberkahan," ujarnya, Senin, (9/2).

Sementara itu, salah satu tokoh keagamaan Provinsi Banten Martin Syarqowi, menjelaskan bahwa istilah zakat profesi berangkat dari konsep kasab, yakni setiap bentuk usaha atau penghasilan, baik dari bertani, berdagang, maupun profesi lainnya.

Ia menegaskan bahwa tidak ada perdebatan mengenai keberadaan zakat profesi, karena pada prinsipnya zakat profesi memang ada. Namun demikian, menurutnya, yang perlu terus dikaji adalah bagaimana penghasilan tersebut dikategorikan secara tepat.

"Baik dalam penentuan posisi sebagai muzaki maupun mustahik, agar penerapan zakat profesi tetap sesuai dengan kaidah syariat dan memberikan keadilan bagi seluruh pihak," paparnya.

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Martin Syarqowi, Sekjen MUI Banten Endang Saeful Anwar menyampaikan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan perhatian besar terhadap isu zakat.

Hingga kini, kata dia, MUI telah mengeluarkan lebih dari 25 fatwa terkait zakat, termasuk Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2023 tentang zakat penghasilan.

"Semua bentuk penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi nishab. Fatwa tersebut masih berlaku dan belum ada pencabutan. Namun demikian, perlu kajian lanjutan terkait penetapan nishab serta perhitungan zakatnya," sambungnya.

Mantan ketua BAZNAS Provinsi Banten, Syibli Syarjaya menyoroti aspek regulasi dan pengelolaan zakat. Ia menyampaikan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia telah memiliki berbagai payung hukum yang jelas.

"Diskusi kita hari ini bukan lagi soal boleh atau tidaknya zakat profesi, tetapi bagaimana cara mengoptimalkan implementasinya agar sesuai regulasi, syariat, dan memberi manfaat maksimal," tegas Syibli.

Dalam kesempatan itu, Perwakilan Kanwil Kemenag Provinsi Banten, Amrullah dalam paparannya juga menegaskan komitmen Kemenag dalam mendukung implementasi Undang-Undang Zakat. Menurutnya, penguatan regulasi dan kebijakan teknis menjadi kunci, termasuk penerapan surat kesediaan zakat kepada setiap muzaki ASN serta kajian komprehensif terkait profesi tertentu.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan publikasi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Banten. "Distribusi zakat perlu terus dipublikasikan melalui video, brosur, dan laporan berkala agar masyarakat mengetahui bahwa zakat dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran." tandasnya.(mpd/bnn)

Banten Defisit 310 Ribu Ton Ikan

SERANG-Provinsi Banten memiliki luas perairan laut sekitar lebih dari 11.112 kilometer persegi. Meski memiliki letak geografis yang sangat strategis, angka produksi ikan di Provinsi Banten nyatanya belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Hal itu sebagaimana diutarakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Agus Supriyadi. Berdasarkan data tahun 2025, kata dia, total produksi perikanan Banten hanya mencapai 190.000 ton per tahun. Jumlah tersebut berasal dari kontribusi perikanan tangkap sebesar 75.000 ton dan perikanan budidaya sebanyak 115.000 ton.

Dia mengatakan bahwa angka ini berbanding terbalik dengan kebutuhan daerah yang mencapai 500.000 ton per tahun. "Jadi kurang 310.000 ton. Dan ini ironis, berarti ada yang harus dioptimalkan," ujar Agus kepada wartawan, Senin (9/2).

Defisit yang mencapai 310.000 ton ini, kata dia, menjadi salah satu hal yang kini pihaknya soroti. Mengingat, Banten berada di titik per-

temuan tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yakni 712, 573, dan 572.

Agus menyebut, kawasan laut Banten sebagai salah satu yang paling strategis di tingkat nasional, sehingga potensi yang ada seharusnya bisa digarap lebih maksimal untuk kepentingan daerah.

Kesenjangan antara pasokan dan permintaan ini, lanjutnya, dikhawatirkan akan berdampak domino pada stabilitas ekonomi warga. "Jika tidak segera ditangani, defisit ini diprediksi akan terus membengkak dan memicu kenaikan harga di pasar," tegasnya.

"Tahun 2026 kita coba mau dioptimalkan bagaimana caranya supaya jangan sampai defisitnya makin besar. Karena ini akan pengaruhi ke harga ikan, dan pengaruh juga ke program Gemar Makan Ikan kita," lanjut Agus.

Sebagai langkah konkret, pemerintah mulai menggalakkan berbagai program strategis. Salah satu fokus utamanya adalah penerapan Cara Berbudidaya Ikan yang Baik (CBIB) serta

pengawasan ketat terhadap alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus diperkuat untuk memberantas praktik illegal fishing yang kerap merugikan nelayan lokal.

"Kita juga berkoordinasi dengan KKP terkait dengan langkah memberantas ilegal fishing," ujarnya.

Agus juga menyoroti melemahnya sektor budidaya yang dulunya merupakan kebanggaan Banten. Ia menyayangkan kebijakan masa lalu yang kurang tepat sehingga membuat performa budidaya ikan di wilayah ini menurun atau 'melehoi'.

Untuk membangkitkan kembali sektor ini, kata dia, diperlukan kolaborasi lintas instansi dan dukungan dari organisasi nelayan, seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

"Saya berharap semua lembaga atau instansi atau para pelaku nelayan ini bisa optimal dengan cara senantiasa saling kerja sama dan berkoordinasi," tandasnya.(mpd/bnn)